INDONESIAN TREASURY REVIEW
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI INDONESIA

(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH TINGKAT PROVINSI DENGAN IPM TINGGI, SEDANG, DAN RENDAH)

Sintong Ariansyah
Universitas Brawijaya
Alamat Korespondensi: sintong.arfiyan@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
20 April 2018

Dinyatakan Diterima
27 Oktober 2018

KATA KUNCI:
IPM, Pengeluaran Pemerintah, Analisis Jalur, PDRB

KLASIFIKASI JEL:
C33, H51, H52, H53, I15, I25

ABSTRAK

Human Development Index (HDI) is an essential benchmark in assessing a country's development. The low quality of Indonesia's HDI is a severe problem that must be handled by the government. One of the solutions to improve the quality of the HDI can be reached through fiscal policy, which is reflected in government spending, especially on economic functions, educational functions, and health functions. The purpose of this study was to analyze the effect of the government expenditure in economic functions, educational functions, and health functions to HDI level in Indonesia. This study uses variable Gross Regional Domestic Product (GRDP) as an intermediate variable. This research uses a path analysis method by taking sample of 15provincial government in the period 2010-2015. The results showed that government expenditure in economic functions and education functions tends to increase the HDI level through the GDP variable, while government expenditure on health functions tends to increase the HDI level directly.

Salah satu tolok ukur hasil pembangunan ekonomi adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi (PDRB), tetapi juga melihat manusia dalam aspek sosial yaitu pendidikan dan kesehatan. Ironisnya, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup tinggi tetapi peringkat IPM Indonesia masih rendah. Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran tersebut adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang dapat dibedakan menjadi berbagai fungsi diantaranya adalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada ketiga fungsi tersebut terhadap IPM melalui PDRB di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2010-2015 pada 15 pemerintah daerah tingkat provinsi dengan kategori IPM tinggi, sedang dan rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis jalur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Ketiga fungsi tersebut memengaruhi IPM dengan jalur yang berbeda di mana fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh melalui variabel PDRB, sedangkan fungsi kesehatan memengaruhi secara langsung tanpa melalui PDRB.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang stabil dan meningkat adalah tujuan utama suatu negara. Dalam negara berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah sangat sentral dalam meningkatkan pembangunan ekonomi tersebut dan menjaga keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tolok ukur dalam pembangunan ekonomi yang baik adalah dengan melihat keberhasilan suatu negara terhadap peningkatan modal manusia. Modal manusia adalah hal yang penting dalam melihat pembangunan ekonomi karena modal manusia tidak hanya melihat aspek ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita, tetapi juga melihat manusia dalam aspek sosial yang diantaranya membutuhkan kehidupan layak melalui pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan dan peningkatan kualitas modal manusia tersebut. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia karena dimensinya sangat luas, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi dari pembangunan manusia melalui tiga indikator utama yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Indonesia mempunyai nilai yang kurang memuaskan terkait peringkat IPM di dunia. Berdasarkan klasifikasi UNDP *(United Nation Development Program)*, Indonesia masuk sebagai negara dengan kategori Nilai Pembangunan Menengah dan menempati peringkat 113 di dunia pada tahun 2015 (*World Bank*)[1]. Hal ini tentu cukup menghawatirkan karena Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia dan menjadi bagian dari *G20* atau 20 (dua puluh) negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Indonesia berada di peringkat lima regional Asia Tenggara dan mempunyai nilai indeks sebesar 0,689 di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Peringkat Indonesia yang berada di tengah ini adalah sebuah ironi dan harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk meningkatkan modal manusia yang kompetitif dan mampu menjadi negara dengan kategori IPM dengan level yang lebih baik sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pemerintah Daerah menjadi sosok strategis terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui berbagai macam kebijakan salah satunya adalah pengeluaran pemerintah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan stimulus positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam kepentingan peningkatan pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang direfleksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa ekonom terutama kelompok Keynesian berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dapat merangsang permintaan agregat di dalam perekonomian dan pada akhirnya memberikan rangsangan terhadap perputaran ekonomi di daerah yang melibatkan sektor publik dan sektor privat[2]. Pengeluaran pemerintah yang ditujukkan pada fungsi tertentu dapat menciptakan *multiplier* ekonomi melalui agregat permintaan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu dibutuhkan kontribusi pemerintah, salah satunya melalui alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi yang tepat.

Klasifikasi pengeluaran Pemerintah dalam bentuk belanja menurut fungsi terdiri dari sembilan fungsi yaitu pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di dalam pasal 33). Di antara fungsi tersebut, tanpa mengesampingkan fungsi yang lain, terdapat tiga fungsi yang perlu diteliti terlebih melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Untuk mendukung aspek tersebut dibutuhkan sebuah alokasi anggaran yang tepat yang terangkum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dalam suatu daerah. Alokasi anggaran yang tepat dalam ketiga fungsi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDRB perkapita serta pembangunan ekonomi yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah pertama, Prasetyo (2013)

---

[1] United Nations Development Program, “2015 HDR Report”, diakses dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_0.pdf, pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 14.39 WIB.

[2] Mankiw, Gregory. 2012*. Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

yang menemukan bahwa ada beberapa pengeluaran pemerintahan negara dengan pengaruh yang cukup terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan diantaranya hanya Singapura dan Zambia yang mampu memberikan pengaruh dan perbaikan positif dalam Indeks Pembangunan Manusia. Kedua, menurut Landau (1997) tidak ada pengaruh yang signifikan pengeluaran pemerintah berupa kesehatan dan pendidikan terhadap modal manusia di contoh negara berkembang yang non komunis. Kemudian Ketiga, menurut Laisina (2015) sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan.

Dari permasalahan tersebut dan beberapa hasil penelitian yang cenderung tidak seragam, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah tingkat provinsi yang diproksikan oleh fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan, terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia. Peneliti mengambil sampel sebanyak lima belas pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia dengan pembagian berdasarkan variasi IPM tinggi hingga rendah. Indonesia adalah salah satu negara dengan PDRB terbesar di dunia tetapi memiliki IPM yang cenderung rendah sehingga hal ini tentu harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk terus bersaing menjadi negara maju dan meningkatkan pembangunan.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bagian ini dijelaskan berbagai teori dan hipotesis yang dibangun untuk mencerminkan landasan dalam melakukan penelitian.

2.1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Pengeluaran Pemerintah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Daerah (APBD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Klasifikasi Belanja Pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi sembilan fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Kesembilan fungsi tersebut dikelompokkan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.

Peran pemerintah dalam sistem ekonomi negara menjadi perdebatan yang terus menerus dan tidak menemui titik kesepakatan. Kaum kapitalis yang dipimpin oleh bapak ekonom klasik yaitu Adam Smith menyatakan bahwa peran pemerintah dalam sistem ekonomi harus diminimalisir. Para ekonom aliran klasik mengganggap bahwa ekonomi akan mencapai keseimbangan tanpa campur tangan pemerintah dan akan terus mengalami perkembangan yang pesat. Ekonom berpaham sosialisme menentang hal tersebut. Karl Marx muncul secara mengejutkan dalam panggung ekonomi dengan pahamnya. Karl Marx berbicara tentang alineasi yang muncul dalam paham kapitalisme dan mendorong berbagai revolusi ekonomi di seluruh dunia. Paham kapitalis kemudian dihantam keras oleh guncangan dunia dalam Depresi Besar pada tahun 1930-an[3]. Terjadinya depresi ini menimbulkan kekhawatirkan adanya kelemahan fundamental terhadap model ekonomi kapitalis dengan semakin besarnya penggangguran di dunia barat. Sehingga kemudian muncul seorang ekonom yang menyelamatkan kapitalisme. Dia adalah John Maynard Keynes. Profesor dari Cambridge University ini mencetuskan teori "ekonomi baru" dimana dituntut adanya intervensi pemerintah. Berbeda dengan ide Karl Marx di mana intervensi pemerintah bersifat mutlak, Keynes memberikan gagasan tentang intervensi pemerintah dalam area fiskal untuk menyeimbangkan ekonomi pasar bukan mengontrolnya secara penuh. Salah satu intervensi atau peran pemerintah yang digagaskan oleh Keynes adalah aspek pengeluaran pemerintah (*government Expenditure*) yang menjadi bagian dari total pendapatan nasional atau PDRB dan berfungsi sebagai kontrol kegiatan ekonomi.

2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Pemenang Nobel bidang ekonomi tahun 1998, Amartya Sen mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh dipandang sebagai tujuan. Harus ada dimensi lain yang lebih menggambarkan tujuan utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan. Dimensi pembangunan harus lebih dipertajam dalam memperhatikan kualitas hidup yang dijalani dan kebebasan individu (Todaro, 2014)[4].

[3] Skousen, Mark. *Sang Maestro*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) hlm xiii

[4] Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen.*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta : Erlangga, 2012.)

Pendapatan riil tidak lagi memadai sebagai ukuran utama kesejahteraan karena dibutuhkan berbagai indikator lain yang terintegrasi seperti tingkat kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu tolok ukur kinerja pembangunan tersebut. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dimensi tersebut adalah dimensi ekonomi, dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan[5]. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pengukuran ini diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup.

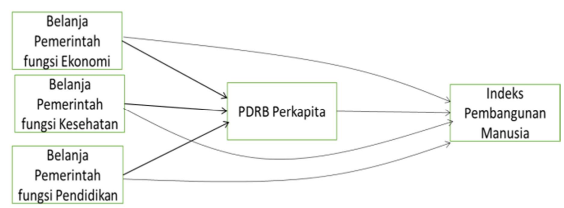
2.3. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan (BPS, 2016)[6]. Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Menurut BPS terdapat tiga pendekatan yang umumnya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu melalui pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Perhitungan pendekatan pengeluaran adalah perhitungan paling umum dalam mendasari konsep PDRB saat ini. Konsep perhitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran ini pertama kali dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam buku *The General Theory* (Skousen, 2005)[7]. Keynes memfokuskan unsur pengeluaran sebagai unsur utama pembentuk PDRB. Beliau mengemukakan konsep perhitungan PDRB yang telah diadopsi dalam perhitungan pendapatan nasional maupun daerah di seluruh dunia.

PDRB dapat dilihat secara total maupun perkapita. Berbeda dengan pengertian PDRB secara umum atau total, PDRB perkapita adalah jumlah PDRB yang dibagi oleh total penduduk di suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan salah satu indikator ekonomi dalam menentukan dimensi Pembangunan Manusia. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan kualitas hidup yang lebih layak di suatu daerah karena rata-rata pendapatan penduduknya tinggi dan semakin mempunyai banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. PDRB perkapita adalah jembatan dalam sudut pandang ekonomi dalam melihat kualitas modal manusia, sedangkan pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari konsep sosial. Integrasi kuat antara ketiga dimensi tersebut membentuk nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dapat diukur dan menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

2.4. Kerangka Konsep

Gambar 1 : Kerangka Konsep



Sumber : Data Diolah Penulis, 2018

2.5. Hipotesis

Terdapat tiga hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini yaitu :

1. diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita;
2. diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita;
3. diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan metode yang digunakan peneliti untuk menjelaskan pengaruh sistematika penelitian.

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengertian penelitian studi kasus menurut Arikunto (2002) adalah suatu

[5] Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik-BPS. "Indeks Pembangunan Manusia", diakses dari http://ipm.bps.go.id/page/ipm, pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 14.50 WIB.

[6] Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kabupaten Rembang 2011-2016.*(Rembang: Badan Pusat Statistik, 2016) hlm. 1

[7] Skousen, Mark. *Sang Maestro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Soepomo (2002) adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau obyek penelitian ini adalah lima belas provinsi di Indonesia. Waktu dalam penelitian ini adalah enam tahun yaitu tahun 2010 hingga tahun 2015. Lima belas provinsi ini menjadi pilihan obyek penelitian mewakili berbagai kategori dalam IPM di Indonesia dari kategori tinggi hingga kategori rendah sehingga diharapkan dapat mewakili kondisi IPM yang sebenarnya di Indonesia.

Tabel 1. Nilai IPM Lima Belas Provinsi obyek Penelitian tahun 2015

Provinsi Kategori IPM tinggi	Nilai IPM	Provinsi Kategori IPM sedang	Nilai IPM	Provinsi Kategori IPM rendah	Nilai IPM
DI YOGYAKARTA	77.59	SUMATERA UTARA	69.51	MALUKU UTARA	65.91
KALIMANTAN TIMUR	74.17	JAWA TENGAH	69.49	NUSA TENGGARA BARAT	65.19
KEP. RIAU	73.75	JAWA TIMUR	68.95	NUSA TENGGARA TIMUR	62.67
SULAWESI UTARA	70.39	BENGKULU	68.59	PAPUA BARAT	61.73
BANTEN	70.27	KALIMANTAN SELATAN	68.38	PAPUA	57.25

Sumber : BPS (diolah)

3.3. Definisi Operasional dan Ukuran Variabel Penelitian

1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Ekonomi
   Pengeluaran pemerintah sektor ekonomi adalah pengeluaran pemerintah yang dilihat melalui alokasi belanja pemerintah daerah yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi di sektor ekonomi dan dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
2. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
   Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan adalah pengeluaran pemerintah yang dilihat melalui alokasi belanja pemerintah daerah yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi di sektor kesehatan dan dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
   Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah pengeluaran pemerintah yang dilihat melalui alokasi belanja pemerintah daerah yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi di sektor pendidikan dan dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.
4. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita
   PDRB perkapita adalah jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto dalam suatu wilayah yang dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Variabel ini mencerminkan rata rata pendapatan kotor yang diterima oleh satu penduduknya. PDRB perkapita yang digunakan dalam penelitian ini merupakan PDRB perkapita provinsi atas Dasar harga berlaku dan dinyatakan dalam jutaan rupiah.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu tolok ukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dan dinyatakan dalam bentuk nilai atau indeks.
6. Variabel *Dummy*[8]
   Variabel *dummy* digunakan untuk mengetahui perbedaan antara ketiga kategori provinsi dengan IPM tinggi, sedang dan rendah. D1 mewakili Konstanta untuk Provinsi dengan IPM sedang, dan D2 mewakili konstanta untuk Provinsi dengan IPM tinggi.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia sedangkan sampel yang digunakan adalah lima belas pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Dalam pengambilan sampel yang mewakili populasi, teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik ini menurut Sugiyono (2007) merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang di ambil adalah provinsi dengan berbagai kategori nilai IPM dari yang tinggi hingga rendah atau kurang.

3.5. Spesifikasi Model

Model yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi data panel untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah, yang terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan, terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita. Metode Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*) Model *Trimming*. Metode ini digunakan untuk menganalis pola hubungan antar variabel dengan mengeluarkan model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan (Riduan, 2017)[9]. Berdasarkan kerangka konseptual, maka terdapat dua bentuk persamaan awal yang disusun yaitu sebagai berikut:

---

[8] Gujarati, Damodar S. *Ekonometrika*. (Jakarta: Erlangga, 2012)

[9] Riduwan, Engkos, Achmad Kuncoro. *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis*, (Alfabeta: Bandung, 2017)

$$Y_{it} = \propto + \beta_1 P1X1_{it} + \beta_2 P1X2_{it} + \beta_3 P1X3_{it} + \beta_4 P1D_1 + \beta_5 P1D_2 + \varepsilon_{it} \quad (1)$$
$$IPM_{it} = \propto + \beta_1 P2X1_{it} + \beta_2 P2X2_{it} + \beta_3 P2X3_{it} + \beta_4 P2Y_{it} + \beta_5 P2D_1 + \beta_6 P2D_2 + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

Dimana :

Y = Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita
X1 = Alokasi Belanja Pemerintah Daerah fungsi Ekonomi
X2 = Alokasi Belanja Pemerintah Daerah fungsi Kesehatan
X3 = Alokasi Belanja Pemerintah Daerah fungsi Pendidikan
IPM = Indeks Pembangunan Manusia
D1 = variabel *Dummy* Kategori IPM Sedang
D2 = variabel *Dummy* kategori IPM Tinggi
P1 = Persamaan Pertama
P2 = Persamaan Kedua
ε = Variabel pengganggu

Model persamaan tersebut bersifat awal dan merupakan model struktur hipotesis. Apabila selama pengujian model terdapat variabel yang tidak signifikan, maka variabel tersebut di keluarkan dari model struktur perbaikan yang baru dan kemudian kembali dilakukan pengujian model.

4. HASIL PENELITIAN

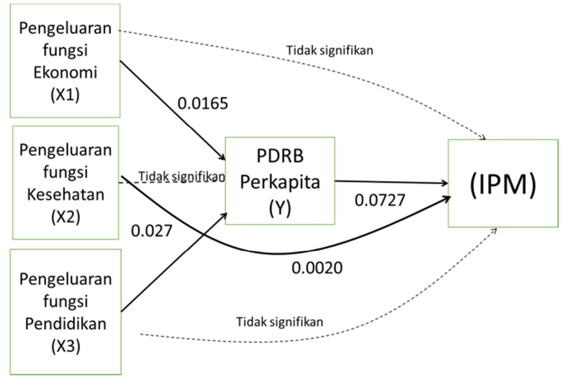
4.1. Hasil Analisis Data

Dalam melakukan analisis data terhadap penelitian ini dibentuk dua persamaan awal yang difungsikan untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas yaitu alokasi pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kedua persamaan tersebut berubah sesuai dengan hasil uji signifikansi dan kesesuaian model dalam analisis jalur menggunakan model *trimming* sehingga membentuk dua persamaan baru yang dalam penelitian ini disebut sebagai persamaan perbaikan.

Setelah melakukan perbaikan model Persamaan Pertama dan Persamaan Kedua dan telah lolos uji kesesuaian model serta uji asumsi klasik, maka terbentuklah model baru dengan koefisien sebagai berikut :

$$(1) Y_{it} = 20.78 + 0.0165\, P1X1_{it} + 0.027\, P1X3 - 14.39\, P1D1 + 26.52\, P1D2 + \varepsilon_{it}$$
$$(2) IPM_{it} = 58.34 + 0.0020\, P2X2_{it} + 0.0727\, P2Y_{it} + 5.16\, P2D1 + 8.47\, P2D2 + \varepsilon_{it}$$

Gambar 2: Struktur Model Perubahan



Sumber : Data diolah Penulis, 2018

Struktur model perbaikan mengeliminasi pengaruh tidak signifikan dalam model persamaan sehingga Pengeluaran Pemerintah Daerah Fungsi Kesehatan (X2) tidak diregresikan kepada PDRB Perkapita (Y) serta Pengeluaran Pemerintah Daerah Fungsi Ekonomi (X1) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan (X3) tidak diregresikan kepada Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari bias koefisien yang timbul dalam menentukan total pengaruh yang diberikan variabel bebas kepada variabel terikat apabila pengaruhnya tidak signifikan. Pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas dan totalnya terangkum dalam tabel Analisis Jalur Penelitian berikut:

Tabel 2 : Analisis Jalur Penelitian

Var.	Koefisien Jalur	Pengaruh		
		Langsung	Tidak Langsung	Total
X1	0.0165	-	0.0727	0.00119
X2	0.0020	0.0020	-	0.0020
X3	0.027	-	0.0727	0.00196
Y	0.0727	0.0727	-	0.0727

Sumber : Data diolah Penulis, 2018

4.2. Pembahasan

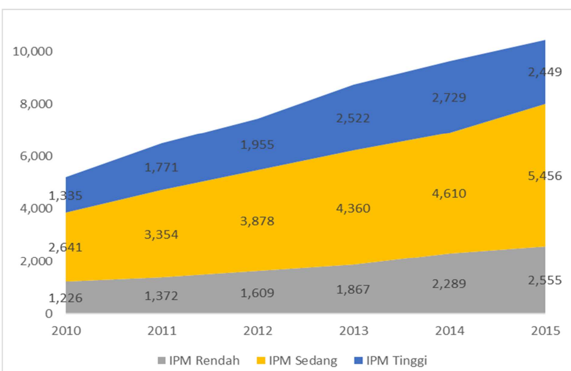
4.2.1. Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah fungsi ekonomi

Sesuai dengan rumusan masalah pertama yang membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah fungsi ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah fungsi ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB perkapita tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah dalam fungsi ekonomi mampu meningkatkan pendapatan perkapita atau pertumbuhan ekonomi. Belanja ekonomi yang merupakan belanja pemerintah terhadap kegiatan ekonomi

seperti perdagangan, UMKM, tenaga kerja, Pertanian, pertambangan, bahan bakar, transportasi dan lain sebagainya sesuai dengan analisis mampu memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kegiatan ekonomi yang dicerminkan dalam Peningkatan PDRB perkapita.

Berdasarkan intepretasi hasil regresi dan analisis jalur, pengeluaran pemerintah daerah fungsi ekonomi mempunyai koefisien pengaruh sebesar 0.0165 terhadap PDRB perkapita artinya setiap kenaikan satu miliar rupiah pengeluaran tersebut akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0.0165 juta rupiah atau sebesar 16.500 rupiah. Hal ini konsisten dengan Teori Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah terutama kepada sektor yang produktif mampu memberikan stimulasi ekonomi kepada daerah sehingga meningkatkan PDRB. Pengeluaran pemerintah yang efektif dan efisien dalam kegiatan ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari peningkatan PDRB perkapita.

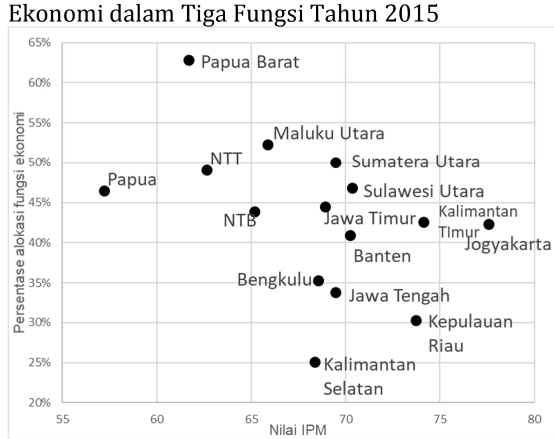
Gambar 3. Total Alokasi Pengeluaran Pemerintah Fungsi Ekonomi di 15 (Lima Belas) Provinsi Obyek Penelitian dalam Miliar Rupiah



Sumber : Data Diolah DJPK, 2018

Seperti terlihat di gambar 3 dapat diketahui bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2015, alokasi pengeluaran ekonomi mengalami peningkatan dari semua kategori provinsi. Hal ini mengindikasikan konsistensi pemerintah terhadap keikutsertaannya menjaga pembangunan ekonomi melalui alokasi fungsi ekonomi yang meningkat. Total alokasi pengeluaran pemerintah daerah fungsi ekonomi di tahun 2010 sebesar 5,2 triliun rupiah dan terus bergerak meningkat sehingga di tahun 2015 sebesar 10,5 triliun rupiah. Alokasi fungsi ekonomi merupakan alokasi terbesar dibanding alokasi dua fungsi yang lain di tahun 2015. Hal ini juga konsisten dengan ekonom asal Jerman yaitu Adolf Wagner[10] yang mengemukakan bahwa aktifitas pemerintah cenderung meningkat dan mengoreksi teori klasik tentang peran pemerintah.

Gambar 4. Persentase Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Fungsi Ekonomi dalam Tiga Fungsi Tahun 2015



Sumber : Data Diolah DJPK, 2018

Sesuai dengan gambar 4, dapat diketahui bahwa Papua Barat mempunyai proporsi alokasi ekonomi terbesar dibanding propinsi yang lain di tahun 2015 yaitu sekitar 63%. Walaupun demikian, alokasi yang besar terhadap alokasi ini tidak menjamin nilai IPM yang tinggi di provinsi tersebut. Hal ini juga berlaku bagi Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur di mana alokasi ekonomi di daerah tersebut lebih dari 45% dibanding dua fungsi lainnya tetapi nilai IPM masih tergolong rendah. Kondisi ini cukup bertolak belakang dengan provinsi dengan IPM tinggi. Provinsi Jogjakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Banten hanya mengalokasikan pengeluaran fungsi ekonomi kurang dari 45% tetapi nilai IPM di Provinsi tersebut cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan alokasi yang cukup besar terhadap fungsi ekonomi bukan merupakan desain terbaik dalam membentuk nilai IPM yang tinggi meskipun sesuai analisis alokasi fungsi ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Kemudian untuk menganalisis fungsi ekonomi lebih dalam yaitu melihat pengaruh dalam pertimbangan kategori IPM per provinsi, dapat dilihat dalam hasil analisis variabel *dummy* Persamaan Pertama. Dalam model tersebut, kedua variabel *dummy* yaitu D1 dan D2 tidak berpengaruh secara signifikan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila pengeluaran

[10] Adolf Wagner adalah ekonom asal Jerman yang melakukan pengamatan terhadap proporsi belanja pemerintah di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada awal abad ke-19. Wagner mengemukakan bahwa aktifitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat.

pemerintah daerah fungsi ekonomi dianggap konstan atau diabaikan, ketiga kategori provinsi baik itu tinggi, sedang maupun rendah tidak memiliki perbedaan konstanta terhadap PDRB perkapita.

Tabel 3. Tingkat Signifikansi Variabel *Dummy* dalam Persamaan Pertama

Variabel	Koefisien	*t-Statistic*	Prob.	Ket.
D1	-14,39036	-0,95825	0,3407	Tidak Signifikan
D2	26,52071	1,766361	0,0809	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil Eviews 9, 2018

Pengaruh yang positif dan signifikan pengeluaran pemerintah daerah fungsi ekonomi terhadap PDRB perkapita atau pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fouladi (2010). Melalui pendekatan yang berbeda, Fouladi menjelaskan bahwa bahwa peningkatan pengeluaran di sektor-sektor produktif seperti pertambangan, minyak dan pelayanan umum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi swasta di Iran meskipun pengeluaran infrastruktur tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meskipun pengeluaran pemerintah daerah ekonomi berpengaruh terhadap PDRB perkapita tetapi fungsi ini tidak berdampak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini disebabkan karena pengeluaran ekonomi berfokus kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan adanya variabel perantara untuk menjelaskan pengaruh secara tidak langsung fungsi ini yaitu variabel PDRB perkapita. Sesuai dengan hasil interpretasi analisis jalur, pengaruh tidak langsung dari pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi adalah sebesar 0,00119 terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui PDRB perkapita. Hal ini memiliki pengertian bahwa setiap kenaikan satu miliar rupiah pengeluaran tersebut akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,00119 atau setiap kenaikan seribu miliar atau satu triliun rupiah pengeluaran fungsi ekonomi akan memengaruhi peningkatan nilai 1.19 Indeks tersebut. Nilai koefisien dari pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi ini merupakan yang paling rendah dibanding alokasi dua fungsi yang lain dalam memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

PDRB perkapita sebagai variabel perantara tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi. Nilai koefisien dari PDRB perkapita adalah sebesar 0,0727 terhadap Indeks Pembangunan Manusia artinya setiap kenaikan satu juta rupiah PDRB perkapita akan meningkatkan 0,0727 nilai IPM. Hal ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilyas *et al* (2016), Muliza *et al* (2017), Agustina *et al* (2016), dan Novita Dewi (2017) yang menyatakan bahwa PDRB atau pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

4.2.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Fungsi Kesehatan

Sesuai dengan rumusan masalah kedua yang membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah fungsi kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia, dapat diketahui bahwa pengeluaran kesehatan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap PDRB perkapita tetapi langsung berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran bidang ini tidak menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi namun lebih mengutamakan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas kesehatan di Indonesia yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi.

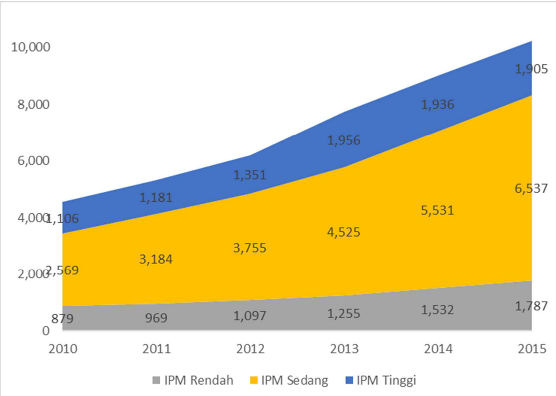
Hal ini diperkuat dari sasaran strategis pemerintah di bidang kesehatan menurut Kementerian Keuangan. Sasaran stragetis pemerintah yang terangkum dalam Informasi APBN tahun 2017 mengutamakan Imunisasi, Jaminan Kesehatan, prevelensi stunting, Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan keluarga Berencana[11]. Dari berbagai sasaran tersebut, hanya biaya operasional kesehatan yang mempunyai kecenderungan peningkatan terhadap ekonomi lebih tinggi dibanding sasaran yang lain karena menyentuh dimensi ekonomi secara langsung. Sedangkan sasaran yang lain yaitu Imunisasi kepada 92% bayi, Jaminan Kesehatan terhadap 94 juta jiwa, prevelansi *stunting* sebanyak 29% baduta serta Keluarga Berencana dalam anggaran kesehatan 2017 adalah refleksi upaya preventif pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia.

Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan mempunyai koefisien pengaruh total sebesar 0,0020 terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Artinya setiap kenaikan satu miliar pengeluaran fungsi tersebut akan meningkatkan nilai indeks sebesar 0,0020 atau setiap satu triliun rupiah pengeluaran fungsi kesehatan akan memengaruhi peningkatan nilai 2.0 Indeks Pembangunan Manusia. Apabila dibandingkan dengan koefisien alokasi dua fungsi yang lain, koefisien pengaruh pengeluaran kesehatan mempunyai nilai terbesar. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengeluaran fungsi kesehatan terhadap peningkatan Indeks

[11] Direktorat Penyusunan APBN-DJA. *Informasi APBN 2017.*(Jakarta : DJA, 2017) hlm.15

Pembangunan Manusia dibanding dua alokasi pengeluaran yang lain.

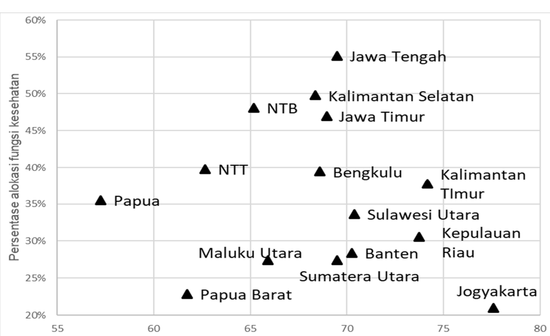
Gambar 5. Total Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Fungsi Kesehatan di 15 (Lima Belas) Provinsi Obyek Penelitian dalam Miliar Rupiah



Sumber : Data Diolah DJPK, 2018

Kemudian apabila melihat peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah daerah fungsi kesehatan seperti dalam gambar 5, dapat diketahui bahwa semakin tahun alokasi pengeluaran kesehatan mengalami peningkatan dari semua kategori provinsi. Hal ini mengindikasikan konsistensi pemerintah daerah terhadap salah satu kebijakan prioritasnya yaitu kesehatan. Total alokasi terus mengalami peningkatan di tahun 2010 yaitu sebesar 4,5 triliun rupiah dan meningkat hingga 10,2 triliun rupiah di tahun 2015. Hal ini juga konsisten dengan ekonom asal Jerman yaitu Adolf Wagner yang mengemukakan bahwa aktifitas pemerintah terus mengalami kenaikan. Meskipun meningkat setiap tahun, tetapi peningkatan yang dialami provinsi dengan IPM rendah sangat kecil dibanding peningkatan provinsi dengan kategori sedang dan tinggi.

Gambar 6. Persentase Alokasi Pengeluaran Pemerintah daerah Fungsi Kesehatan dalam Tiga Fungsi Tahun 2015



Sumber : Data Diolah DJPK, 2018

Sesuai dengan gambar 6, Provinsi Jawa Tengah mempunyai persentase terbesar dibanding provinsi lainnya dalam pengalokasian fungsi kesehatan di tahun 2015. Provinsi dengan IPM sedang yang lain seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan juga mempunyai proporsi alokasi cukup besar dalam fungsi ini di mana proporsinya lebih dari 45% di tahun 2015.

Persentase terendah justru didapat oleh Provinsi Jogjakarta sebagai daerah dengan IPM tertinggi. Provinsi lain dengan IPM tinggi juga tidak memberikan porsi yang cukup besar bagi pengeluaran fungsi ini seperti Banten, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur di mana nilai persentasenya kurang dari 40%. Hal ini mengindikasikan kurang bergantungnya provinsi dengan IPM tinggi terhadap alokasi fungsi kesehatan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh fondasi kesehatan yang cukup baik di provinsi dengan kategori ini sehingga pemerintah daerah lebih mengalokasikan pengeluaran pemerintah dalam fungsi yang lain. Kemudian kondisi ini juga diperkuat oleh analisis variabel *dummy* dalam Persamaan Kedua di mana provinsi dengan kategori IPM tinggi dan sedang tidak terlalu bergantung dengan fungsi ini dibandingkan dengan provinsi dengan IPM rendah.

Tabel 4. Tingkat Signifikansi Variabel *Dummy* dalam Persamaan Kedua

Var.	Koefisien	*t-Statistic*	Prob.	Ket.
C	58.34121	45.13972	0.0000	Signifikan
D1	5.169708	2.889262	0.0049	Signifikan
D2	8.472268	4.678622	0.0000	Signifikan

Sumber: Hasil Eviews 9, 2018

Sesuai dengan tabel dalam analisis jalur struktur Persamaan Kedua di tabel 4, kedua variabel *dummy* berpengaruh signifikan sehingga memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan di antara ketiga kategori apabila pengeluaran kesehatan dianggap konstan atau diabaikan. Provinsi dengan Kategori IPM rendah mempunyai indeks yang jauh lebih rendah dibanding yang lain yaitu 58,34 sedangkan IPM sedang (D1) dan tinggi (D2) masing masing mempunyai nilai IPM 63,51 dan 66,81 apabila pengeluaran kesehatan diabaikan.

Berbagai fakta dan data tersebut mengindikasikan pentingnya peningkatan alokasi kesehatan pemerintah daerah tingkat provinsi dengan IPM rendah karena sesuai analisis alokasi kesehatan adalah variabel dengan pengaruh terbesar dalam peningkatan IPM terlebih untuk provinsi dengan IPM kategori rendah. Ironisnya meskipun secara analisis sangat dibutuhkan, persentase alokasi fungsi ini cukup kecil dalam provinsi dengan IPM rendah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Papua Barat. Hanya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

mempunyai proporsi lebih dari 45%. Kondisi ini memberikan informasi bahwa kurang perhatiannya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesehatan, padahal secara umum kondisi kesehatan di kategori provinsi ini masih rendah. Salah satu contohnya adalah Provinsi Papua. Kesehatan yang masih rendah di Provinsi Papua dapat dilihat dari munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan masalah gizi buruk yang dialami sebagian warga suku Asmat yang terjadi di akhir tahun 2017. Terdapat berbagai faktor penyebab tersebut antara lain cakupan imunisasi dasar yang kurang, tenaga kesehatan tidak terdistribusi dengan baik dan gizi buruk. Hal ini memperkuat analisis bahwa pengeluaran fungsi kesehatan harusnya menjadi prioritas bagi provinsi ini secara khusus dan provinsi dengan IPM yang rendah secara umum di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Agustina *et al* (2016) dan Kahang *et al* (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur dan Kutai Timur. Muliza *et al* (2017) dan Laisina *et al* (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa variabel pengaruh kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh dan Sulawesi Utara. Walaupun demikian ada beberapa hasil penelitian yang konsisten dengan hasil analisis ini yaitu penelitian dari Ilyas *et al* (2016), Razmi (2011) dan Okafor *et al* (2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran kesehatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau HDI di masing masing obyek penelitian yaitu Kabupaten Sinjai, Iran dan Nigeria.

4.2.3. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi pendidikan

Sesuai dengan rumusan masalah ketiga yang membahas bagaimana pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita di Indonesia, dapat diketahui bahwa alokasi pengeluaran pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia meskipun pengaruh terhadap IPM tersebut diketahui secara tidak langsung dan melewati variabel perantara.

Berdasarkan analisis regresi dan jalur, pengeluaran pemerintah daerah fungsi pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB perkapita dengan nilai koefisien sebesar 0,027 artinya setiap kenaikan satu miliar rupiah pengeluaran pemerintah fungsi ini akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,027 juta rupiah atau 27 ribu rupiah. Nilai koefisien ini lebih tinggi dibanding nilai koefisien fungsi ekonomi sehingga dapat diinterpretasikan bahwa alokasi fungsi ini memberikan pengaruh peningkatan yang lebih tinggi terhadap PDRB perkapita dibanding alokasi fungsi ekonomi.

Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan mempunyai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,00196 terhadap Indeks Pembangunan manusia melalui PDRB perkapita. Nilai koefisien tersebut mempunyai pengertian bahwa setiap kenaikan satu miliar pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan akan meningkatkan nilai indeks sebesar 0,00196 atau setiap kenaikan satu triliun rupiah pengeluaran fungsi pendidikan akan memengaruhi peningkatan nilai sebesar 1,96 Indeks Pembangunan Manusia.

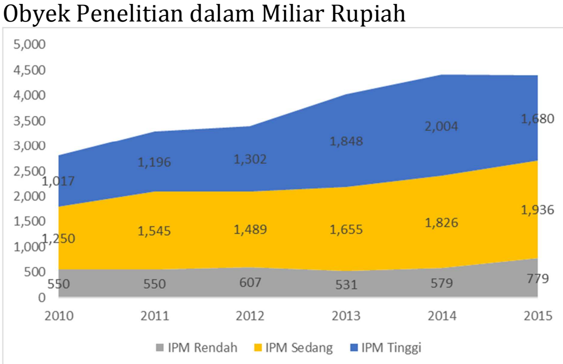
Hal ini juga diperkuat oleh Atmanti (2005) yang menjabarkan peranan ilmu pengetahuan dan investasi modal sumber daya manusia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang semakin tinggi memperluas pengetahuan dan rasionalitas cara berpikir manusia. Hal ini memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi manusia untuk menerima dan memproses informasi dengan lebih cepat dan terstruktur sehingga meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga mendukung hipotesis yang diajukan serta menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Ilyas *et al* (2016), Merang Kahang *et al* (2016) dan Laisina *et al* (2015) yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk pendidikan berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Todaro (2006) bahwa pendidikan sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital dan memiliki kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, tetapi alokasi pengeluaran fungsi pendidikan tidak berpengaruh secara langsung karena harus melalui variabel perantara PDRB perkapita terlebih dahulu untuk melihat pengaruhnya. Nilai koefisien dari pengeluaran fungsi ini lebih tinggi dibanding fungsi ekonomi tetapi lebih rendah dibanding fungsi kesehatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengeluaran fungsi pendidikan lebih menyentuh kenaikan pendapatan perkapita dibanding peningkatan kualitas pendidikan.

Hal ini juga dapat dilihat dari sasaran pemerintah bidang pendidikan menurut Kementerian Keuangan yang bertujuan memberikan Tunjangan Profesi kepada 1,3 juta guru, suntikan dana kepada siswa melalui Kartu Indonesia Pintar kepada 19,7 juta jiwa, Bantuan Bidik Misi kepada 362 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada lebih dari 50 juta siswa serta rehabilitasi sekolah di tahun

2017[12]. Kebijakan umum pemerintah terhadap pendidikan ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena bantuan bersifat dana finansial sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan perkapita di Indonesia meskipun peningkatan kualitas atau indeks pendidikan menurut analisis belum berdampak secara langsung.

Gambar 7. Total Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan di Lima Belas Provinsi Obyek Penelitian dalam Miliar Rupiah



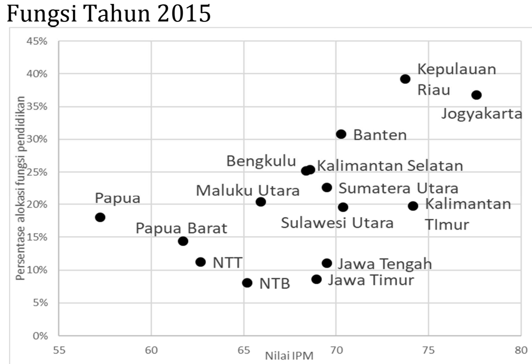
Sumber : Data Diolah DJPK, 2018

Sesuai dengan gambar 7 dapat diketahui bawah alokasi pendidikan umumnya mengalami peningkatan tetapi cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 alokasi fungsi ini bahkan mengalami total penurunan sebesar 0,3% dari 4,40 triliun rupiah di tahun 2014 menjadi 4,39 triliun rupiah pada tahun 2015. Alokasi pengeluaran pendidikan menjadi yang terendah dibanding dua fungsi lainnya yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hal tersebut mengindikasikan kurang konsistennya pemerintah daerah terhadap peningkatan alokasi pendidikan di daerah masing masing.

Menurut hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ditemukan kurang optimalnya pengelolaan keuangan anggaran daerah salah satunya dari sisi anggaran pendidikan. Jumlah gaji dan tunjangan guru jauh lebih besar dibanding alokasi untuk pembangunan maupun renovasi sekolah yang rusak[13]. Hal ini memperkuat analisis bahwa pengeluaran pendidikan secara langsung berdampak kepada kegiatan ekonomi tetapi tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Meskipun secara umum proporsi alokasi fungsi pendidikan cukup rendah dibanding dua fungsi lainnya serta alokasinya yang fluktuatif, tetapi fungsi pendidikan sesuai analisis tetap memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Alokasi fungsi ini bahkan lebih menggambarkan keteraturan secara grafik statistik tentang proporsi alokasi dan Indeks Pembangunan Manusia. Umumnya daerah dengan IPM tinggi mempunyai alokasi fungsi pendidikan yang tinggi dan daerah dengan IPM rendah umumnya mempunyai alokasi fungsi yang kecil. Sesuai dengan gambar 8, proporsi alokasi pendidikan yang besar umumnya terdapat dalam provinsi dengan IPM tinggi seperti Kepulauan Riau dan Jogjakarta. Tingginya alokasi di dua provinsi tersebut mengindikasikan kepedulian pemerintah daerah tersebut terhadap pendidikan.

Gambar 8. Persentase Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan dalam Tiga Fungsi Tahun 2015



Sumber : Data Diolah DJPK, 2018

Provinsi dengan IPM sedang mempunyai persentase alokasi yang bervariasi, di mana terdapat tiga provinsi dengan alokasi yang cukup tinggi seperti Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Sumatera Utara yang mempunyai alokasi di atas 20%. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai proporsi yang kecil yaitu hanya dibawah 15%. Berbeda dengan provinsi dengan IPM tinggi dan sedang, provinsi dengan kategori IPM rendah mempunyai proporsi pendidikan yang kecil. Hampir semua provinsi dengan kategori ini kecuali Maluku Utara, mempunyai persentase kurang dari 20%. Hal ini mengindikasikan kurang perhatiannya Pemerintah Daerah tingkat provinsi terhadap alokasi fungsi pendidikan dalam kategori provinsi IPM rendah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto perkapita dan Indeks

[12] *Ibid*., hlm 21

[13] Simorangkir, Eduardo. "Dana Pendidikan Lebih Banyak untuk Gaji Ketimbang Bangun Sekolah." Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3738100 tanggal 29 Mei 2018 pukul 19.31

Pembangunan Manusia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal yang dibangun di mana menurut hipotesis diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita. Walaupun demikian, pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia bersifat tidak langsung dan melalui PDRB perkapita dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran fungsi ekonomi menyentuh pendapatan perkapita dan secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap PDRB perkapita. Hasil ini kurang sesuai dengan hipotesis kedua yang dibangun di mana hipotesis tersebut menyatakan bahwa diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi fungsi ini lebih menitikberatkan kepada kualitas peningkatan kesehatan atau pembangunan ekonomi dibanding peningkatan pendapatan individu atau pertumbuhan ekonomi.
3. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui dan Domestik Regional Bruto perkapita. Hasil analisis ini konsisten dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa diduga bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB perkapita. Walaupun demikian, pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia bersifat tidak langsung dan melalui PDRB perkapita terlebih dahulu. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi terhadap fungsi ini memengaruhi pendapatan individu tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan sehingga diperlukan desain yang baik dalam menetapkan alokasi yang tepat untuk peningkatan kualitas pendidikan.
4. Meskipun dari ketiga hipotesis yang dibangun terdapat hasil analisis yang kurang sesuai, tetapi semua variabel pengeluaran pemerintah daerah dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan jalur pengaruh yang berbeda. Fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh tidak langsung melalui PDRB perkapita dan fungsi kesehatan berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia tanpa melalui PDRB perkapita.
5. Pengalokasian pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan mempunyai pengaruh tertinggi kemudian diikuti oleh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan yang terakhir adalah pengeluaran fungsi ekonomi dalam memengaruhi IPM.
6. Provinsi dengan IPM rendah mempunyai ketergantungan tinggi terhadap pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan dibanding provinsi dengan IPM sedang dan tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah di provinsi dengan kategori ini.

5.2 Saran

Dengan mempertimbangkan kesimpulan yang diambil dan beberapa pembahasan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ketiga fungsi pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini yaitu fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui jalur analisis yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan IPM Indonesia yang masih rendah dibanding negara lain, dibutuhkan peran pemerintah daerah tingkat provinsi terhadap alokasi pengeluaran pemerintah pada ketiga fungsi tersebut.
2. Alokasi fungsi ekonomi dapat dipertajam dengan menitikberatkan kepada sektor ekonomi yang produktif dan dibutuhkan disetiap karakteristik provinsi yang berbeda sehingga mampu memberikan efek yang lebih baik kepada pendapatan individu dan Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun demikian karena sifatnya yang tidak langsung kepada Indeks Pembangunan Manusia dan koefisien pengaruh yang paling kecil dibanding dua fungsi lain, apabila pemerintah daerah berfokus kepada pembangunan maka pengeluaran pemerintah fungsi ini seharusnya digunakan dengan lebih efisien atau sebagian dapat dialihkan kepada fungsi lain yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan.
3. Pemerintah daerah tingkat provinsi dapat mempertimbangkan belanja di sektor kesehatan untuk peningkatan pembangunan dibanding peningkatan pendapatan perkapita. Alokasi untuk kesehatan juga harus lebih dipertajam untuk peningkatan kualitas kesehatan dan meminimalisir alokasi untuk peningkatan ekonomi karena pengaruhnya tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita. Alokasi fungsi kesehatan seperti

pemberian imunisasi dasar, perbaikan gizi buruk, jaminan kesehatan dan penyuluhan keluarga berencana harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sedangkan alokasi kesehatan yang cenderung memengaruhi ekonomi seperti peningkatan gaji tenaga medis, dan peningkatan biaya operasional kesehatan harus lebih diminimalisir dan ditinjau kembali. Apabila pemerintah daerah berfokus kepada pembangunan maka alokasi di fungsi kesehatan dapat menjadi prioritas karena memiliki pengaruh terbesar terhadap IPM dibanding dua fungsi lain.

4. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi pendidikan tidak berpengaruh secara langsung terhadap IPM disebabkan alokasi selama ini memiliki kecenderungan hanya terhadap peningkatan pendapatan perkapita seperti peningkatan gaji guru dan tunjangan guru, dana bantuan sekolah dan beasiswa. Sehingga diperlukan desain ulang alokasi yang tepat terhadap fungsi pendidikan agar tidak hanya memberi pengaruh terhadap pendapatan perkapita tetapi juga memberikan pengaruh secara langsung terhadap pembangunan. Alokasi pendidikan dapat difokuskan terhadap peningkatkan kualitas pendidikan seperti rehabilitasi sekolah, peningkatan pelatihan dan pengembangan ilmu serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Pemerintah daerah tingkat provinsi dengan IPM kategori rendah seharusnya lebih menitikberatkan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan karena menurut analisis provinsi tersebut membutuhkan pengeluaran fungsi kesehatan untuk peningkatan pembangunan. Daerah dengan IPM rendah umumnya masih menganggap kurang pentingnya fungsi ini dengan memberikan alokasi lebih kepada fungsi lain.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di tiga fungsi yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan mampu memberikan efek yang positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah perlu cermat dalam mengalokasikan anggaran terhadap belanja tersebut karena karakteristik masing-masing fungsi mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap pembangunan. Fungsi kesehatan mempunyai pengaruh terbesar terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan menjadi bagian fundamental terlebih kepada provinsi dengan IPM yang rendah. Setelah alokasi kesehatan membentuk fondasi kesehatan yang kuat, alokasi tepat terhadap fungsi pendidikan adalah hal yang dapat dipertimbangkan dengan desain yang lebih baik. Kemudian ketika kesehatan dan pendidikan telah terstruktur dengan baik, alokasi yang tepat terhadap fungsi ekonomi adalah cara selanjutnya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan data. Sumber data terkait alokasi berdasarkan fungsi hanya mengakomodasi teknik sampel dalam pengeluaran pemerintah daerah yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat provinsi di Indonesia. Penelitian ini tidak memperhitungkan pengeluaran pemerintah pusat yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi Kementerian / lembaga.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCES*)

Agustina *et al*. 2014. Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen,* Volume 12, No. 2, 192-217.

Atmanti dan Dwi, Hastarini. (2005). Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, No.1, 30-39.

Atmawikarta. 2003. Investasi Kesehatan untuk Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan,* No. 30, 1-14.

Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kabupaten Rembang 2011-2016.* Rembang: Badan Pusat Statistik.

Boediono. 2012. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Deliarnov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Dewi, Novita. 2017. Pengaruh kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *JOM Fekon,* Vol. 4, No. 1, 870-822.

Direktorat Penyusun APBN. *Informasi APBN 2017.* Jakarta: Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran.

Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Fouladi, Masoome. 2010. The Impact of Government Expenditure on GDP, employment and private investment a CGE model approach. *Iranian Economic Review,* Vol.15, No.27, 55-75.

Gujarati, Damodar S. 2007. *Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.

Ilyas *et al*. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai. Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kahang *et al*. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi,* Volume 18, No. 2, 130-140.

Landau, Daniel. 1997. *Government Expenditure, Human Capital Creation and Economic Growth. Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management,* Vol. 9 No.3, 467-487.

Laisina *et al*. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2002-20013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,* Vol. 15, No. 04, 193-208.

Mulia *et al*. 2017. Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam,*Vol. 3, No.1, 51-69.

Nugroho, Yanuar. 2018. *Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola.* Kantor Staf Presiden. Jakarta. Retrieved from http://www.ksp.go.id/tantangan-kesehatan-papua-alam-manusia-dan-tatakelola

Okafor *et al*. 2017. Effect of Government Expenditure on Human Capital Development in Nigeria. *IARD International Journal of Banking and Finance Research*, ISSN 2406-8634 Vol. 3, No.2, 1-14.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.

Prasetyo *et al*. 2013. The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance,* No.5, 615 – 622.

Razmi, M. Javad. 2012. Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran. *Scientific Papers Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology,* Vol.2, No. 5, 1-13.

Riduwan, Engkos, Achmad Kuncoro. *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis*, Alfabeta: Bandung, 2017.

Sabir *et al*. 2015. Local government expenditure, economic growth and income inequality in South Sulawesi province. *Journal of Applied Economics and Business,* Vol. 3, No. 2, 61-73.

Simorangkir, Eduardo. 2017. *Dana Pendidikan Lebih Banyak untuk Gaji Ketimbang Bangun Sekolah*. Retrieved from https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3738100

Skousen, Mark. *Sang Maestro*, Prenadamedia Gorup. Jakarta: 2005.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supomo, Bambang dan Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakara: Penerbit BPFE UGM.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen. 2012. *Economic Development 11th Ed*. Pearson Higher Ed. USA.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah